

Skripsi

**INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGANAN ANAK-ANAK MISKIN PESISIR
DI HALMAHERA TIMUR**

SITI JUNIARTI A. KADIR

Nomor Stambuk : 105640137311



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGANAN ANAK-ANAK MISKIN PESISIR
DI HALMAHERA TIMUR**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SITI JUNIARTI A. KADIR
Nomor Stambuk : 105640137311

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

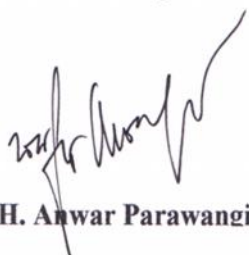
2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir Di Halmahera Timur
Nama Mahasiswa : Siti Juniarti A. Kadir
Nomor Stambuk : 105640137311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Parawangi, M. Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S. Sos, M. Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



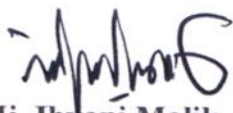
A. Lubur Prianto, S. IP, M. Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

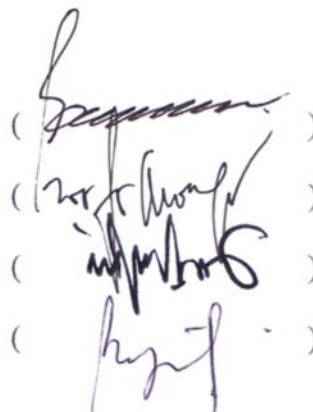
Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Handam, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama Mahasiswa : Siti Juniarti A. Kadir

Nomor Stambuk : 105640137311

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2018

Yang Menyatakan,

Siti Juniarti A. Kadir

ABSTRAK

SITI JUNIARTI A. KADIR. *Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir di Kabupaten Halmahera Timur* (dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intervensi pemerintah daerah dalam penanganan anak-anak miskin pesisir di Kabupaten Halmahera Timur, serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap program pemerintah daerah dalam penanganan anak-anak miskin pesisir di Kabupaten Halmahera Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Informan sebanyak 9 (Sembilan) orang, Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa: observasi, wawancara terhadap informan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penanganan anak-anak miskin pesisir: (a) berdasarkan pengamatan penulis bahwa *provision* (penyediaan) telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan menyediakan anggaran sebesar 4 milyar yang dianggarkan dalam APBD yang menunjang terlaksananya program pengentasan kemiskinan yang di dalamnya terdapat penanganan terhadap anak-anak miskin. (b) pemerintah daerah telah memberikan *subsidy* (subsidi/tunjangan) kepada masyarakat miskin terutama anak miskin yaitu dengan memberikan subsidi berbentuk uang tunai yang terdapat dalam program keluarga harapan (PKH) dan bantua-bantuan sosial lainnya. (c) *regulation* (regulasi/peraturan) indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu melaksanakan suatu program kerja berdasarkan yang telah ditetapkan. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Timur.

Keyword : Intervensi, Pemerintah Daerah, Anak-anak Miskin Pesisir

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “*Intervensi pemerintah daerah dalam penanganan anak-anak miskin pesisir di Halmahera Timur*” dapat di selesaikan oleh penulis walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawang, M. Si sebagai pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M. Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

3. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
4. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Almarhum Bapak Abdullah Abdul Kadir dan Ibu Astuti H. Abdurahman terima kasih atas segala bimbingan, kasih sayang, jasa dan pengorbanannya sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik, penghargaan dan doa semoga Allah SWT memberinya umur panjang dan selalu dalam lindungannya, dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap rekan-rekan Akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 2011 dan teman-teman kelas D Ilmu Pemerintahan yang banyak memberi ide atau pikiran, kritikan yang bersifat membangun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Januari 2018

Siti Juniarti A. Kadir

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan TIM	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Intervensi	6
B. Tahapan Intervensi.....	10
C. Instrumen Intervensi Pemerintah Daerah	14
D. Konsep Pemerintah Daerah	17
E. Konsep Kemiskinan.....	20
F. Masyarakat Nelayan	26
G. Kerangka Pikir	35
H. Fokus Penelitian.....	35
I. Deskriptif Fokus Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Halmahera Timur	43
B. Intervensi Pemerintah Daerah.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya pembangunan yang dilakukan selama ini, dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta keberhasilan pembangunan dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, tangguh, dan ulet. Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat erat kaitannya dengan pembangunan pendidikan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu melalui peningkatan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal, maupun pendidikan informal sehingga kualitas sumber daya manusia itu dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembangunan. Hal itu selaras dengan tujuan pendidikan nasional yaitu seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3.

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sebagian penduduknya berorientasi di bidang produksi ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Akan tetapi, pembangunan di bidang tersebut terutama di bidang perikanan masih belum optimal. Belum optimalnya pembangunan di bidang perikanan dapat dilihat dari adanya lingkaran kemiskinan

yang menjerat nelayan hingga saat ini. Salah satu penyebab belum optimalnya pembangunan di bidang perikanan adalah rendahnya tingkat pendidikan nelayan di Indonesia.

Keberadaan penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut sehingga wajib diantas. Gagasan ini tersirat dalam ungkapan Smith (1776) dalam Todaro (2004) yang menyatakan bahwa “Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan”. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tantangan utama pembangunan dewasa ini, karena hakikat pembangunan ekonomi bukan terletak pada pendapatan yang dihasilkan suatu wilayah, tetapi pada peningkatan kualitas kehidupan penduduk.

Menariknya, fenomena kemiskinan ternyata tidak hanya memberikan dampak negatif bagi orang dewasa saja, tetapi juga pada anak-anak. Dampak yang ditimbulkan pada anak justru jauh lebih berbahaya dan beresiko karena dampak kemiskinan pada anak bersifat kerusakan jangka panjang. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan masa kecil yang bahagia, berkualitas dan yang layak didapatkan oleh anak-anak menjadi terampas karena kondisi ekonomi keluarga. Kemiskinan yang melilit keluarga membuat peran anak-anak dalam keluargapun bergeser, karena mereka menjadi ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga.

Kemiskinan merupakan penyebab utama kerentanan anak di Indonesia. Kemiskinan menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar anak terhadap kesehatan, nutrisi, dan pendidikan yang baik. Stres yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan akses yang terbatas pada sumber daya menambah risiko

penelantaran anak. Data dari BPS menunjukkan bahwa di tahun 2016, 23,4 juta anak usia di bawah 16 tahun hidup dalam kemiskinan dan 3,4 juta anak usia antara 10-17 tahun bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Mayoritas dari mereka hanya tamat sekolah dasar, yang berarti bahwa mereka telah dikeluarkan dari sekolah pada usia dini dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan benar-benar merupakan masalah multidimensi yang memerlukan kebijakan dan program intervensi multidimensi dengan tujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu program yang berkesinambungan, dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah Daerah berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menuntut ilmu dengan bersekolah sebagai upaya peningkatan mutu masyarakat.

Hal ini diharapkan agar masyarakat di setiap daerah terutama di daerah Kabupaten Halmahera Timur merasa tidak terkucilkan dan pemerintah daerah juga dapat memberdayakan masyarakatnya di bidang pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 10 kecamatan, jumlah penduduk di tahun 2016 mencapai angka 87.680 jiwa, diantaranya jumlah laki-laki 45.973 jiwa dan jumlah perempuan 41.707 jiwa.

Adapun jumlah rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 13.711 keluarga, pada tahun 2016 naik menjadi 13.719 keluarga. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 jumlah angka melek huruf di Kabupaten Halmahera Timur sebesar 95,79 % dan 4,21 % yang belum bisa membaca.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dan menciptakan masyarakat yang terampil, terdidik, dan berteknologi sebagai prasyarat mutlak pembentukan manusia yang bermutu dan berkualitas.

Intervensi pemerintah dan swasta mempunyai andil yang besar untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan manusia. Berbagai kebijakan dibidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tampaknya masih perlu di tingkatkan dalam mamacu kemajuan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Halmahera Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka sangat kompleks permasalahan yang harus dijawab dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan fokus dan dibatasi pada batas rumusan masalah **“Bagaimana Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir di Halmahera Timur.?”**

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui intervensi pemerintah daerah dalam penanganan anak-anak miskin pesisir di Halmahera Timur.”

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk memperkaya wawasan ilmiah yang dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan penentu kebijakan agar tetap membuat program intervensi pemberdayaan masyarakat miskin pesisir terutama anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Intervensi

Literatur mengenai intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut dipergunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosa dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang di jumpai dalam proses diagnosa. Tahap perencanaan intervensi harus diikuti dengan serangkaian konsep yang saling berhubungan satu sama lain. Yaitu antara lain terdiri dari teori, model dan kerangka konsep. (Argyris, 2014: 28).

Intervensi merupakan suatu kegiatan campur tangan, perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi/negara. Dalam (Abdullah, 2008: 22/03) menyatakan bahwa Intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk kedalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada diantara orang-orang, kelompok ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Ada suatu pemikiran yang implisit dari pemikiran Argyris yang harus dibuat eksplisit. Pemikiran itu ialah bahwa sistem yang akan diintervensi itu tidak tergantung sama sekali pada pengintervensi. (Abdullah, 2008: 22/ 07).

Sisi manajemen organisasi adalah sebuah sistem lain atau suatu sarana yang menerima input manajemen berupa tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan outputnya diharapkan berupa realisasi yang sesuai dengan rencana tersebut. Dalam sistem organisasi maka yang jadi tujuan adalah bagaimana agar tercipta

kerjasama diantara personil yang terkait dalam struktur organisasi itu. (Abdullah, 2008: 22/ 03).

Intervensi kreatif atas dasar ilmu pengetahuan yang ada pola ini dimaksudkan menciptakan suatu model intervensi berdasarkan atas ilmu pengetahuan yang ada. Dengan demikian konsultan berusaha menciptakan model intervensi yang kreatif dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang ada dan yang dikuasainya. Umpamanya, konsultan mau menerapkan model tim biding berdasarkan dari sisi ilmu pengetahuan lain. Maka konsultan mengembangkan model-model tim biding dari sisi ilmu tersebut. Dari pengembangan model dari ilmu pengetahuan lainnya ini, maka akan diperoleh model intervensi yang lain dari sebelumnya. (Abdullah, 2008: 22/ 03).

Intervensi merupakan upaya untuk membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan peranan sosialnya dengan baik. Sedangkan metode intervensi sosial dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas) untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya, maksudnya adalah setiap masyarakat harus mampu berperan sesuai statusnya didalam masyarakat. Yang mana status tersebut diakui oleh lingkungan dan status tersebut tidak melewati batasan-batasan norma-norma yang ada. Adapun fungsi sosial terbagi menjadi tiga bagian : (Rahman, 2014:15).

- a. Fungsi sosial aktif yakni individu tersebut mampu menjalankan perannya dimasyarakat dikarenakan individu tersebut mampu untuk menyesuaikan diri

dengan baik dimasyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi kemandiriannya itu mencapai keberhasilan mencapai tugas sesuai dengan usia dan harapan masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan diri dari makan, berpakaian, prestasi diri, dll), tanggung jawab pribadi yaitu mampu memantau perilaku pribadinya dan dapat menerima semua resiko/tanggung jawab atas pengambilan suatu keputusan, pembuatan keputusan, tanggung jawab sosial yaitu menerima tanggung jawab sebagai anggota/masyarakat dan melaksanakan tingkahlaku yang sesuai dengan harapan kelompok/masyarakat, penyesuaian sosial terhadap lingkungan.

- b. Fungsi sosial Risk yakni individu tersebut mengalami tekanan sosial dalam masyarakat sehingga ia melakukan penyimpangan sosial seperti kecenderungan menyalah gunakan obat terlarang, melakukan tindak kriminal.
- c. Fungsi sosial Maladaktif yakni individu tersebut tidak mampu menjalankan perannya di masyarakat dikarenakan individu tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat, contoh: homoseksual.

Melakukan intervensi sosial seorang agen perubahan harus memiliki tiga buah bekal yaitu pengetahuan seorang praktisi dengan perubahan dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang baik terkait konsep dibidang kesejahteraan sosial skill keterampilan yang mana seorang praktisi agen perubahan harus mampu menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki kedalam praktek-praktek dimasyarakat nilai-nilai yang di susung oleh praktisi kesejahteraan sosial sendiri adalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial yang

mengarah pada kebaikan, seperti nilai pelayanan, keadilan, sosial, harkat dan martabat seseorang, mementingkan hubungan kemanusiaan, integritas, dan kompetensi.

Manusia adalah objek dari intervensi yang kita lakukan. Jika diatas telah dipaparkan terkait apa metode intervensi sosial, tujuan apa yang hendak kita capai dalam melakukan intervensi, dan bekal apa saja yang kita miliki jika ingin melakukan intervensi. Maka pada point kali ini kita akan membahas mengenai manusia, sebab manusia adalah objek dalam intervensi sosial yang kita lakukan.

Sebagai seorang praktisi agen perubahan kesejahteraan sosial kita harus mampu memahami bahwa manusia adalah makhluk yang unik maksudnya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling berbeda. Perbedaan ini dihasilkan karena perbedaan budaya dan sosialisasi yang dialami.

Hal kedua yang harus kita pahami adalah manusia merupakan makhluk sosial. Menurut *Richard* dalam (Syafiie, 2011:60). bahwa penyakit- penyakit yang diderita manusia ternyata tidak hanya di sebabkan oleh aspek- aspek organik saja tetapi juga disebabkan oleh aspek sosial-psikologik, sosial-ekonomi, spiritual dan sebagainya. Ia merupakan gabungan ketiga unsur tersebut. Apabila salah satu unsur tersebut rusak, maka akan berpengaruh pada unsur lainnya juga. Kita dapat mengambil dari suatu kisah seorang ibu ,ketika kondisi biologis ibui ni sakit, maka hal tersebut bisa berpengaruh pada psikologis dan sosial. Sangat sensitif, mudah marah, sehingga jika anaknya berbuat salah sedikit saja akan dimarahi. Dengan memahami bahwa manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosial hal ini menuntut agar praktisi kesejahteraan

social mampu untuk melihat segala hal permasalahan pada sudut pandang yang luas dan mendalam.

Hal ketiga yang perlu dipahami adalah, bahwa manusia memiliki multi status. Maka seorang individu harus mampu beradaptasi lebih dari satu status. Jika individu tersebut menjalankan peran lebih dari satu status itu dengan baik maka individu/manusia tersebut akan mampu merasakan kesejahteraan sosial (Rahman, 2014:17).

Metode Intervensi sosial dalam konteks penanganan pada anak adalah aktifitas untuk melaksanakan rencana penanganan dengan memberikan pelayanan terhadap anak dalam keluarga maupun lingkungan lembaga kesejahteraan sosial. Metode intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan dalam hal ini. individu, keluarga dan kelompok.

Sedangkan menurut Isbandi Rukmianto Adi intervensi sosial adalah perubahan yang terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*change agent*) terhadap berbagai sasaran perubahan (*target of change*) yang terdiri dari individu, keluarga dan kelompok kecil (level mikro), komunitas dan organisasi (level *mezzo*) dan masyarakat yang lebih luas, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, negara maupun tingkat global (level makro).

B. Tahapan Intervensi

Maka berangkat dari kebutuhan inilah maka kita dapat memotivasi nelayan dengan cara-cara mempersiapkan tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat pada satu sisi, sebenarnya mempunyai kemiripan

dengan tahap pengembangan masyarakat sebagai suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ketarampilan yang lebih baik. Tetapi, bukan merupakan tahapan yang mengenai anak tangga, dimana seseorang harus berjalan sesuai tahap demi tahap melainkan merupakan tahapan yang berbentuk siklus dan spiral dimana agen perubah dimungkinkan kembali ketahap sebelumnya atau pengkajian apabila mendapat masukan baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan program pemberdayaan tersebut. Adapun tahapan intervensi sosial yaitu:

a. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan sekurang-kurangnya ada dua tahapan yang harus dipersiapkan yaitu:

1. Penyiapan petugas lapangan dalam hal ini tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh petugas lapangan ini harus bisa menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, apalagi dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, mengingat latar belakang anggota tim biasanya mempunyai latar belakang yang berbeda misalnya ada lulusan sarjana agama, sarjana ilmu kesejahteraan, dll. Sehingga perlu dilakukan pelatihan awal untuk menyamakan persepsi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan didaerah tersebut.
2. Tahap penyiapan lapangan kerja pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan

secara informal, secara formal maksudnya tim agen perubah harus bisa mendapat perijinan dari pihak-pihak pemerintah daerah. Sedangkan, secara informal tim agen harus bisa menjalin kontak dengan tokoh-tokoh agama sekaligus mendekati para warga terlebih dahulu dengan melakukan pertemuan-pertemuan dari sinilah menjadi kunci apakah akan ada warga yang berminat untuk menjadi kader atau tidak.

- b. Tahap pengkajian. Tahap ini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Petugas sebagai agen perubah mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki oleh klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat dalam proses pengkajian digunakan tahap pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Terkadang masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda dengan petugas yang akan menawarkan program pemberdayaan, disini petugas tidak dapat memaksakan pandangan mereka kemasyarakat melainkan, harus diadakan upaya menjembatani perbedaan pandangan tersebut, misalnya dengan melakukan penyadaran masyarakat ataupun memberikan informasi pada masyarakat agar mereka dapat berdiskusi dan mempertimbangkan keadaan lingkungan mereka secara lebih rasional.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing) Petugas sebagai agen perubah secara partisipasif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi masalah yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan

yang dapat mereka lakukan. Dalam proses ini petugas sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program serta kegiatan apa saja yang tepat dilakukan pada saat itu.

- d. Tahap pemformulasian rencana aksi. Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan proposal untuk pihak penyanggah dana. Tetapi jika kelompok ini sebelumnya beberapa kali pernah mengajukan permohonan maka, kelompok ini hanya perlu mengkonsultasikan secara singkat apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam proposal tersebut. Dalam tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian mereka dapat mengarahkan tindakan itu sesuai dengan apa yang sudah diformulasikan.
- e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan (implementasi). Tahap ini harus diperhatikan dengan baik, karena jika kurangnya kerjasama antara petugas dan warga masyarakat atau pertentangan kelompok dalam melaksanakan program dilapangan akan dapat melenceng dari rencana sebelumnya, dalam program pemberdayaan ini diharapkan kader masyarakat juga dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Teknologi yang digunakanpun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Meskipun sederhana tetapi tetap berfungsi dengan baik. Contoh timbangan bayi yang manual.

- f. Tahap evaluasi. Tahap ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan, program ini memang harus melibatkan masyarakat agar terbentuk komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Tentunya diharapkan program pemberdayaan ini berjalan dengan baik meskipun tidak berjalan dengan semestinya, maka sangat dibutuhkan umpan balik berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan. Sehingga jika diperlukan maka dilakukan assessment.
- g. Tahap terminasi tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam program pemberdayaan masyarakat, dilakukan tidak jarang bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena jangka waktu yang diberikan sudah melebihi yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan sudah tidak ada penyandang dana yang mau atau dapat meneruskan. Meskipun demikian, petugas tetap harus keluar secara perlahan dari komunitas dan bukan secara mendadak.

C. Instrumen Intervensi Pemerintah

Instrumen pemerintah (*instruments of government*) adalah cara-cara pemerintah bertindak, yakni mekanisme yang digunakan pemerintah ketika menjalankan fungsi-fungsi yang dapat dibenarkan. Menurut Hughes dalam setiyono (2014), intervensi dan peranan pemerintah terhadap kehidupan rakyat pada umumnya dilakukan melalui empat instrument, yakni: 1) *provision* yakni peran pemerintah menyediakan barang atau jasa (*good or service*) melalui

anggaran (APBN atau APBD); 2) *subsidy* yakni pemerintah membantu seseorang atau kelompok *sector private* untuk memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang dikehendaki pemerintah, dan sesungguhnya *subsidy* ini merupakan *sub-category* dari *provision*; 3) *regulation* yakni pemerintah menggunakan kekuatan memaksa untuk mengizinkan atau melarang aktifitas tertentu. Titik tekan instrumen-instrumen tersebut bervariasi dari waktu ke waktu tergantung dari kebutuhan dan konteks peristiwa yang ada dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat.

Selain ketiga instrumen di atas, Helco (dalam Wayne Parsons : 2005) mengemukakan bahwa pemerintah membutuhkan instrumen untuk mengimplementasikan fungsinya, dimana instrumen tersebut adalah kebijakan, dimana kebijakan adalah suatu istilah yang disepakati oleh umum yang biasanya digunakan untuk mempertimbangkan keputusan tertentu juga untuk perubahan sosial. Sedangkan Eaulau dan Previt (dalam Tangkilisan : 2003) mengartikan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan melaksanakannya. Selanjutnya Menurut Jones (dalam Tangkilisan : 2003), kebijakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

- a. *Goals* atau tujuan yang diinginkan
- b. *Plans* atau rencana untuk mencapai tujuan
- c. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- d. *Effect* atau akibat-akibat dari program.

1. Provision (Persediaan)

Provision adalah penyediaan barang atau jasa secara langsung oleh pemerintah melalui *budget* (anggaran) adalah merupakan instrumen utama yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Anggaran merupakan area yang sering disebut sebagai “*general government*” mengingat di dalamnya pemerintah menentukan sumber-sumber pendapatan (pajak, retribusi, dan sebagainya), serta menentukan penyediaan barang dan jasa yang vital seperti pembangunan jalan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum (*general social welfare*). Instrumen *provision* melalui *budget* juga secara umum merupakan media bagi pemerintah untuk melakukan control terhadap aktivitas ekonomi Negara. dengan tiga perangkat kebijakan, yaitu : alokasi (*allocation*), distribusi (*distribution*) dan stabilisasi (*stabilization*).

2. Subsidy (Subsidi/Tunjangan)

Subsidi memiliki bentuk yang bervariasi termasuk bantuan kepada petani, industri, kepada pengusaha, atau kepada sekolah swasta. Mereka yang diberikan subsidi pada intinya diharapkan untuk menyediakan barang atau jasa tertentu untuk publik, tapi dengan dukungan pemerintah. Pemberian subsidi biasanya disertai persyaratan agar penerima subsidi menyediakan produk atau jasa dengan standar tertentu yang ditetapkan pemerintah. Meskipun dana subsidi adalah merupakan bagian dari dana publik, akan tetapi detail administrasi pengelolaannya dilakukan oleh sang penerima subsidi, sedangkan pemerintah hanya memantau penggunaannya agar sesuai dengan apa yang semestinya. Subsidi diberikan karena pemerintah, akibat satu atau beberapa alasan, tidak mau

atau mengalami keterbatasan dalam menyediakan sendiri suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.

3. *Regulation* (Peraturan)

Peraturan berarti penggunaan undang-undang oleh pemerintah untuk memengaruhi aktivitas *private*. Berkenaan dengan hal ini, OECD (1992:10) menyatakan bahwa *regulation* adalah secara esensial merupakan sesuatu untuk mengizinkan atau melarang aktivitas (termasuk) ekonomi melalui sistem legal, seperti menentukan tarif, memberikan lisensi atau izin, dan menentukan pasar tenaga kerja. Untuk menjamin dilaksanakannya *regulation*, pemerintah memiliki kekuasaan memaksa yang dilaksanakan oleh aparat hukum (jaksa, polisi dan tentara).

Dalam konteks ekonomi, *regulation* biasanya dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong aktifitas bisnis atau melindungi masyarakat dengan atau konsumen, biasanya berkenaan dengan standar kualitas (*quality standards*) suatu produk, tingkat keamanan (*safety level*).

D. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Nuramelia (2014:07) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit

adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Fatih (2014:13) pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Suradinata dalam Fatih (2014:13), pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Affan dalam Fatih (2014:13) pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat defenisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggara daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau WaliKota dan perangkat daerah lainnya.

E. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan. Lebih sederhana, (Bank Dunia: 2000 dalam Indra: 2014) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada dibawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Marianti dan Munawar (dalam Indra: 2014) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. Niemiets: 2011 (dalam Indra: 2014) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, sehingga kemiskinan didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Tergantung dari sisi mana dan bagaimana mendefinisikannya. Oleh karena itu, memandang dan mendefinisikan

kemiskinan yang terbaik justru didasarkan pada perbedaan konsep dan fenomena tersebut (Lo-Dessallien, 1999 dalam Bagong: 2013). Perbedaan konsep kemiskinan akan mendasari perbedaan pemahaman, perlakuan, dan kebijakan untuk mengatasinya.

Kemiskinan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, kemiskinan absolut, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dan oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (*underdevelopment trap*) atau tidak mungkin sejahtera.

Kemiskinan Alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam kondisi demikian, peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil dan tingkat efisiensi produksinya relatif rendah. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, etos kerja sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

Kemiskinan Absolut biasanya dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum. Hal ini didasarkan pada sejumlah kebutuhan nutrisi. Kebutuhan absolut juga sering disebut dengan kemiskinan primer, bahkan disebut dengan kemiskinan ekstrim.

Kemiskinan Relatif diperoleh dengan membandingkan kelompok masyarakat berpendapatan terendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi (kelompok bawah dengan kelompok atas). Pembagian pendapatan masyarakat ini sering dikelompokkan dalam ukuran desil atau kuantil.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan.

Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004:167-168).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProPenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman

seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004:1-6) berupa: (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan berupa rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena ketidakberdayaan mereka; dan (4) Kemiskinan karena faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Sedangkan Sharpet dalam Kuncoro (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusi yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan (Tim Studi KKP, 2004). Sahdan (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di desa yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor

pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

Anak yang lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga miskin, memiliki kemungkinan 35 persen lebih tinggi untuk tetap miskin saat dewasa dibandingkan anak yang lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak miskin. Kemiskinan menyebabkan individu dan keluarga terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, sehingga investasi sumberdaya manusia yang dilakukan kurang. Kemiskinan tersebut akhirnya diturunkan kepada generasi selanjutnya karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan dalam keluarga pada generasi berikutnya. Anak-anak merupakan kelompok umur yang paling parah didera oleh kemiskinan dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Kemiskinan yang menimpa anak-anak akan menyebabkan kerusakan jangka panjang, baik terhadap perkembangan mental maupun fisiknya.

Hal ini pada gilirannya akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya ketika mereka menjadi orang dewasa yang tetap terjebak dalam mata rantai kemiskinan dan tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kemiskinan pun akan terus berlanjut seakan tanpa batas bagi mereka. Lebih jauh, kemiskinan bagi anak-anak akan membawa sejumlah konsekuensi negatif, antara lain terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif (antara lain kemampuan membaca), dan terganggunya fungsi sosio-emosional yang menyebabkan

penyimpangan perilaku dan depresi. Di kalangan keluarga miskin, salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian khusus adalah nasib anak-anak yang sering kali tidak berdaya dan menjadi korban situasi kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka (Bagong: 2013).

Akibat penghasilan yang pas-pasan, atau bahkan sangat kekurangan yang menyebabkan keluarga miskin tidak memiliki tabungan atau simpanan uang yang cukup sehingga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Di sisi lain, akibat tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan tidak menguasai ragam keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan alternatif, sering terjadi keluarga miskin itu menjadi apatis, cenderung bersikap menerima nasib, pesimis, tidak berdaya, dan enggan beresiko (Bagong :2013).

Mencari nafkah dan mengorbankan waktu yang seharusnya untuk bermain dan sekolah untuk sepenuhnya bekerja, bagi anak-anak keluarga miskin acapkali harus dilakukan karena memang tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Studi yang dilakukan oleh Kuntoro dkk. (dalam Bagong: 2013) di Jawa Timur menemukan faktor utama yang menyebabkan anak-anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah adalah karena orang tua mereka kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Sementara itu, menurut Maria Fransiska Subagyo (dalam Bagong: 2013), kemelaratan diakui merupakan salah satu penyebab timbulnya kasus pelajar putus sekolah. Namun demikian, diluar itu faktor yang harus diperhatikan adalah cara keluarga mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, dan sikap atau aspirasi orang tua terhadap pendidikan.

Tujuan akhir kebijakan pendidikan sebuah negara adalah meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyatnya seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintahan yang baik adalah yang mampu memfokuskan pada pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata.

Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktifitas pendidikan dari pemerintah maupun sektor swasta. Karena perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah pendidikan melalui kebijakan-kebijakan publik yang bersifat mengikat dan mengintervensi.

Kebijakan adalah intervensi (campur tangan) atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil tertentu (yang diharapkan) khususnya dalam bidang pendidikan. Posisi kebijakan dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai dengan memberikan dampak pengaruh melalui proses intervensi (campur tangan) yang dilakukan oleh Pemerintah.

F. Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung

maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi 2009).

Menurut Kusnadi (2003) ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskina yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah : (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, (2) sistim pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak

lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Selanjutnya Mulyadi (2007) mengatakan bahwa sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya dihadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

Keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nelayan yang miskin, hal ini tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, di pinggir jalan kampung umumnya merupakan bangunan non permanen atau semi permanen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun siang hari, di dalam rumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih baik berbentuk permanen (Siswanto 2008).

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan, (Kusnadi 2009).

Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi 2009).

Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya lingkungan. Karena itu persoalan penyelesaian kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik.

Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, pilihan ini benar-benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia yang memang terbatas. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi 2007).

Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar (Siswanto 2008). Sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi 2007).

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya ini

menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi 2009).

Menurut Kusnadi (2007) ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskina yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah : (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

G. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung),

seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima PKH ini selamanya.

PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program ini mulai beroperasi pada tahun 2007 sebagai program rintisan (pilot) yang disertai unsur penelitian di dalamnya.

Di awal kebijakan, pelaksanaan program rintisan ini menunjukkan kemajuan yang lamban, terlihat pada terbatasnya cakupan program (dalam pengertian jumlah keluarga maupun wilayah penerima manfaat). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan PKH, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.

PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil /Nifas/Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan

fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

1. Manfaat Program Keluarga Harapan

- a. Merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya
- b. Untuk jangka pendek memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin
- c. Untuk jangka panjang dapat memutus rai kemiskinan antar generasi melalui:
 - Peningkatan kualitas kesehata/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (*price effect* anak keluarga sangat miskin)
 - Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*)
- d. Mengurangi pekerja anak
- e. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender).

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

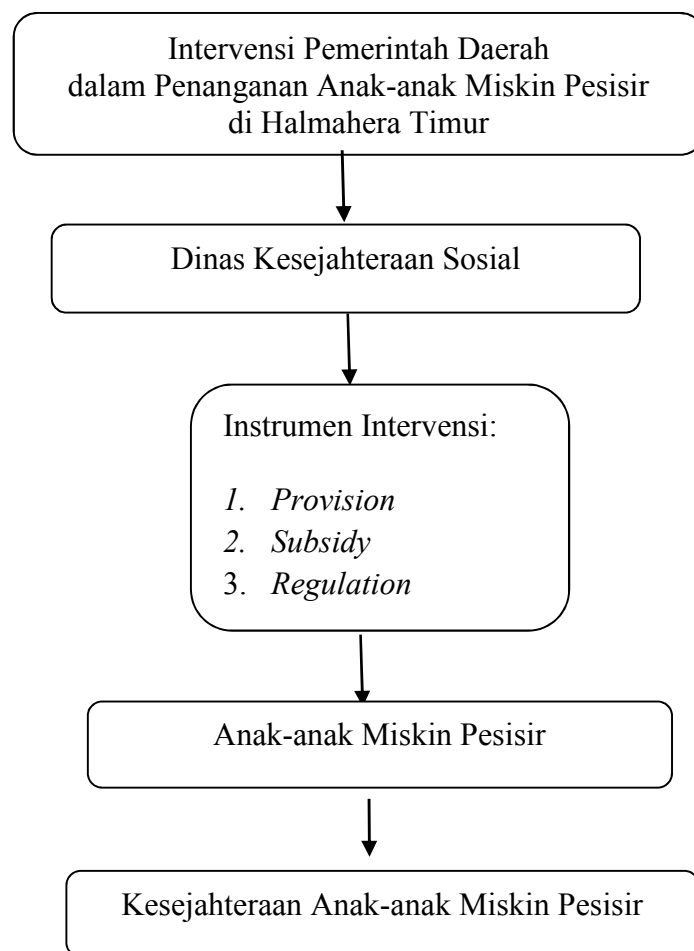
- a. Meningkatkan kemampuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan

- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM
 - c. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak - anak (usia wajib belajar SD/SMP) RTSM
 - d. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
3. Hak Peserta PKH
- a. Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan
 - b. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes, dsb)
 - c. Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal
 - d. Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jamkesmas, BSM, Raskin, Kube, BLSTM)
4. Penerima Bantuan
- a. Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan
 - b. Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah kakak perempuan dewasa
 - c. Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya.

H. Kerangka Pikir

Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir di Halmahera Timur yaitu dengan memperhatikan instrumen intervensi pemerintah daerah seperti *provision* (persediaan), *subsidy* (tunjangan), dan *Regulation* (peraturan). Berikut bagan kerangka pikir :

Bagan Kerangka Pikir



I. Fokus Penelitian

Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir dengan menjalankan instrument pemerintah daerah yaitu *provision*, *subsidy*, dan

regulation dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir yang ada di Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara.

J. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Intervensi pemerintah melalui instrument *provision* yaitu pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur menyediakan anggaran melalui APBD sebesar 4 milyar yang menunjang terlaksanannya Program Keluarga Harapan (PKH) yakni salah satu program pengentasan kemiskinan yang di dalamnya terdapat penanganan anak-anak miskin.
2. *Subsidy* merupakan dana publik yang diberikan oleh pemerintah guna meringankan beban masyarakat terutama masyarakat miskin. Tahapan subsidi berupa bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin terutama anak-anak.
3. *Regulation* adalah pemerintah menggunakan undang undang untuk memengaruhi aktivitas masyarakat. Indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 Tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” dan Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. Berdasarkan keputusan diatas pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur ikut berpartisipasi menjalankan program keluarga harapan (PKH) yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Serta Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No 22 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Tim Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Timur.

4. Kesejahteraan sosial anak miskin pesisir adalah suatu keadaan dimana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (mamadai) terhadap anak-anak dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan materiil, tetapi juga dalam kehidupan spiritual anak-anak yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilakukan selama dua bulan mulai bulan Desember sampai bulan Januari. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir di Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologis dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir di Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah mereka yang mempunyai peran mengintervensi anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 1. Bagian Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan/Status	Jumlah
1	Hj. Kusniah Muh. Tahir, Bsc	KMT	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur	1 Orang
2	Rukiah Tubagu, S.Sos	RT	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial	1 Orang
3	Alex Delly	AD	Kepala Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Dinas Kesejahteraan Sosial	1 Orang
4	Ikbal Abd Karim	IAK	Staf	1 Orang
5	Siti Nur	SN	Nelayan	1 Orang
6	Yamin Abd Kari	YAK	Nelayan	1 Orang
7	Muhammad Rusdi	MR	Nelayan	1 Orang
8	Siti Nafisa	SN	Masyarakat	1 Orang
9	Hamsa	HS	Masyarakat	1 Orang
Total Informan				9 Orang

Berdasarkan table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil 9 orang untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Pemilihan informan diatas

diambil dari Dinas Kesejahteraan Sosial yaitu Kepala Dinas 1 orang, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial 1 orang, Kepala Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia 1 orang, Staf Dinas Kesejahteraan Sosial 1 Orang, dan masyarakat 5 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data primer tersebut. Keuntungan dari pemanfaatan data sekunder adalah peneliti tidak terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan merekrut dan melati pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu.

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan anak-anak miskin pesisir yang menjadi sampel penelitian.
2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut dengan Intervensi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak-anak Miskin Pesisir di Halamahera Timur, Pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada pengungkapan masalah penanganan anak-anak miskin pesisir.
3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanganan anak-anak miskin pesisir oleh pemerintah daerah. Studi ini menambah kejelasan dalam

membahas secara rinci. Dengan permasalahan dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan anak-anak miskin di Halamahera Timur Maluku Utara.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga unsur utama dalam proses analisa data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan
2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu divertifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012:270) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Timur

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kabupaten Halmahera Timur yang menjadi lokasi penelitian.

1. Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Timur

Visi : Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera

Mis :

- a. Meningkatkan Masyarakat Yang Maju dan Berdaya Saing
- b. Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri
- c. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
- d. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Agamis
- e. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

2. Letak Geografis Kabupaten Halmahera Timur

Secara astronomis Halmahera Timur terletak antara 0040'-104' Lintang Utara dan 126045'-129030' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Timur memiliki batas-batas: Utara-Kabupaten Halmahera Tengah dan Teluk Kao. Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan.

Barat-Teluk Kao dan Kota Tidore Kepulauan. Timur-Teluk Buli, Laut Halmahera dan Samudera Pasifik.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki 10 Kecamatan dan menurut peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 tahun 2012, tentang pembentukan desa, jumlah desa yang ada adalah 102 Desa. Kabupaten Halmahera Timur memiliki luas wilayah sekitar 14.202,01 km² dengan luas daratan 6.506,19 km² dan luas Lautan 7.695,82 km².

Jumlah penduduk kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 87.680 jiwa, Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang berjumlah 83.878 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Wasile Selatan (13.170 jiwa) sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Wasile Utara (5.080 jiwa).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016

Kecamatan	Penduduk		Gender Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Maba Selatan	3.760	3.550	106
Kota Maba	4.890	4.100	119
Wasile Selatan	6.890	6.280	108
Wasile	5.530	5.130	108
Wasile Timur	5.370	5.010	107
Wasile Tengah	2.970	2.890	103
Wasile Utara	2.660	2.420	110
Maba	6.240	5.450	114
Maba Tengah	3.210	2.810	114
Maba Utara	4.450	4.070	110
Jumlah	45.970	41.710	110

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Timur, 2016

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Halmahera Timur sebesar 110 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Bila dilihat pola rasio jenis kelamin per kecamatan seluruhnya bernilai diatas 100, berarti seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.3

Jumlah Nelayan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016

Kecamatan	Jenis Nelayan		Jumlah
	Tetap	Tidak Tetap	
(1)	(2)	(3)	(4)
Maba Selatan	265	173	438
Kota Maba	127	110	237
Maba	220	130	350
Maba Tengah	79	122	201
Maba Utara	127	161	288
Wasile	115	163	278
Wasile Tengah	126	179	305
Wasile Utara	35	71	106
Wasile Timur	48	86	134
Wasile Selatan	414	277	691
Jumlah	1.556	1.472	3.028

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Timur. 2016

Berdasarkan tabel diatas jumlah nelayan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2016 sebanyak 3.028 nelayan yang terdiri dari nelayan tetap sebanyak 1.556 dan nelayan tidak tetap sebanyak 1.472. dan kecamatan dengan tingkat nelayan terbanyak berada pada Kecamatan Wasile Selatan yang merupakan pengeksportan terbesar di Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah 691 nelayan, data ini di dapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 1.4
Jumlah Masyarakat Miskin, Anak-anak Nakal, Anak Terlantar, dan
Anak Jalanan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016

Nama Kecamatan	Keluarga Miskin	Anak		
		Nakal	Terlantar	Jalanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maba Selatan	699	5	0	0
Kota Maba	90	10	0	0
Maba	522	13	0	0
Maba Tengah	724	0	0	0
Maba Utara	679	0	2	0
Wasile	398	31	0	0
Wasile Timur	755	64	2	0
WasileTengah	712	0	12	0
Wasile Utara	555	0	12	0
Wasile Selatan	1.728	5	6	87
Jumlah Total	6.862	128	34	87

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur. 2016

Berdasarkan tabel diatas jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Timur sebesar 6862 jiwa, jumlah anak nakal sebesar 128 jiwa, jumlah anak terlantar sebesar 34 jiwa dan jumlah anak jalanan sebesar 87 jiwa. Data ini menunjukkan jumlah masyarakat miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Wasile Selatan.

Tabel 1.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah
(7-24 tahun) di Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2015-2016

Penduduk Usia Sekolah (Tahun)	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
7-12	94.55	99.24
13-15	82.18	91.50
16-18	53.74	55.49
19-24	4.58	10.03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Timur. 2016

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang sangat tinggi hanya pada tingkat usia pendidikan dasar (7-12) dan pada usia sekolah tingkat menengah pertama (13-15 tahun), yang mana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu tahun 2011 sebesar 94.55 persen anak bersekolah dari seluruh anak yang berusia 7-12 tahun dan meningkat menjadi 99.24 persen di tahun 2012. Sementara anak yang berusia 13-15 tahun (usia SLTP) sebesar 82.18 persen di tahun 2015 menjadi 91.50 persen di tahun 2016. Ini berarti hampir semua anak usia 7-12 tahun (usia SD), dan usia 13-15 tahun (usia SLTP) sudah bersekolah aktif.

Fenomena lain terjadi pada saat memasuki usia sekolah 16-18 tahun atau pada tingkat menengah atas sudah mulai kecil persentasenya bahkan pada usia 19–24 tahun (usia pendidikan tinggi) kelihatan sangat kecil hanya 4,58 % dari penduduk pada usia tersebut pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 10,03 % pada tahun 2016.

Melihat persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) tersebut diatas yang mana usia sekolah mulai 7 tahun sampai dengan 18 tahun (sampai pendidikan lanjutan Tingkat Atas, dimana setiap jenjang sudah lebih besar dari 50 %), dapat dijadikan indikator bahwa kesadaran masyarakat tentang betapa penting pendidikan bagi anggota keluarganya semakin membaik. Tapi pendidikan setelah itu sudah mengalami kendala dengan semakin menurun drastis persentasenya pada tahap lanjut di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Intervensi pemerintah dan swasta mempunyai andil yang besar untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia untuk mendukung pembangunan manusia. Berbagai kebijakan dibidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tampaknya masih perlu di tingkatkan dalam mamacu kemajuan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Halmahera Timur.

B. Intervensi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam melakukan intervensi terhadap penanganan anak-anak miskin pesisir sangat penting karena anak-anak merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan dasar berupa pendidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 guna meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan upaya untuk mengintervensi dalam penanganan anak-anak miskin di Kabupaten Halmahera Timur dengan melakukan berbagai upaya nyata melalui kebijakan.

1. *Provision* (Persediaan)

Tahapan *provision*, yaitu penyediaan anggaran secara langsung oleh pemerintah ini merupakan instrument utama yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya. *Provision* melalui anggaran juga secara umum merupakan media bagi pemerintah untuk mengontrol kebijakan, dengan tiga komponen kebijakan salah satunya distribusi (*distribution*). Kebijakan distribusi merepresentasikan usaha pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial, distribusi perlu dilakukan agar mereka yang kurang beruntung tidak memiliki rasa ketersaingan sosial. Komponen terbesar dalam kebijakan distribusi adalah

penyediaan anggaran bagi kesejahteraan sosial, termasuk diantaranya bagi keamanan sosial dan pendidikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur telah menjalankan fungsinya sebagai distributor yakni menyalurkan anggaran melalui APBD guna mengatasi ketimpangan sosial antara masyarakat.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan bagaimana intervensi pemerintah daerah dalam penanganan anak-anak miskin pesisir di Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut :

“Kami dari pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial sudah berperan aktif dalam melakukan intervensi terhadap penanganan anak-anak miskin terutama anak-anak miskin pesisir dengan menyediakan anggaran sebesar 4 miliar untuk bantuan sosial terkait dengan terselenggaranya pendidikan dan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur” (Hasil wawancara, KMT 6 Desember 2016)

Sesuai dengan pernyataan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial telah melakukan intervensi terhadap penanganan anak-anak miskin di Kabupaten Halmahera Timur dengan menyediakan anggaran melalui APBD sebesar 4 miliar rupiah untuk bantuan sosial agar terselenggaranya pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin terutama anak-anak.

Hal ini sesuai dengan uraian Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial yang menyatakan bahwa :

“Iya dalam intervensi terhadap penanganan anak-anak miskin dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial yang diberikan wewenang oleh Bapak Bupati, dan sudah turut berperan aktif. (Hasil Wawancara, RT 7 Desember 2016)

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa sejauh ini pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial sudah melakukan intervensi terhadap penanganan anak-anak miskin pesisir di Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga anak-anak miskin di Kabupaten Halmahera Timur dapat di kontrol oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang kemudian dampaknya dapat di rasakan oleh masyarakat miskin terutama anak-anak karena kebutuhan dasar berupa mendapatkan pendidikan dan perlindungan sosial yang layak telah terpenuhi. Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kesejahteraan Sosial telah menyediakan anggaran untuk membantu anak-anak miskin terutama anak nelayan miskin) yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.”(Hasil wawancara, AD 7 Desember 2016)

Pernyataan disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang menyatakan bahwa sudah ada upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah permasalahan anak-anak miskin terutama anak nelayan anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu Staf Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah telah menyediakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin khususnya anak-anak miskin dengan memberikan bantuan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal ini kebutuhan perlengkapan sekolah,”(Hasil wawancara IAK, 7 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah satu Staf Dinas Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa sejauh ini pemerintah daerah telah menyediakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya kebutuhan

untuk anak-anak. pemerintah berharap agar mampu membantu meringankan beban mereka dengan bantuan sosial yang diberikan tersebut.

Berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian dideskripsikan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam persediaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan pemerintah daerah telah berperan aktif dalam melakukan intervensi penanganan anak-anak miskin, hal ini menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator dengan menyediakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin terutama anak-anak. Dan bantuan ini disambut baik oleh masyarakat setempat karena dengan bantuan sosial ini masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah.

2. *Subsidy* (subsidi/Tunjangan)

Tahapan *subsidy* merupakan dana publik yang diberikan oleh pemerintah guna meringankan beban masyarakat terutama masyarakat miskin. Tahapan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin terutama anak-anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur ikut berpartisipasi bersama pemerintah pusat dalam memberikan tunjangan atau bantuan kepada masyarakat miskin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur memberikan subsidi kepada masyarakat miskin pesisir berbentuk uang tunai yang terdapat dalam program keluarga harapan (PKH), besar anggaran yang siapakan oleh pemerintah daerah adalah sebesar 4 milyar yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2015.

**Tabel 1.6 Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Tahun Anggaran 2015**

No	Kecamatan	KSM Tahap I	KSM Tahap II
1	Maba Selatan	316	314
2	Kota Maba	116	114
3	Maba	259	258
4	Maba Tengah	439	482
5	Maba Utara	322	320
6	Wasile	105	105
7	Wasile Timur	441	439
8	Wasile Tengah	383	379
9	Wasile Utara	87	86
10	Wasile Selatan	703	694
Jumlah		3.171	3.191
Daya Serap Dana Tahap I (Rupiah)			2.734.947.500
Daya Serap Dana Tahap II (Rupiah)			1.124.480.000
Total yang terealisasi			3.859.427.500

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur, 2015

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran program keluarga harapan (PKH) pada tahun 2015 tahap pertama sebesar Rp 2.734.947.500 dengan jumlah peserta di 10 kecamatan sebanyak 3.171 keluarga dan pada tahap kedua sebesar Rp 1.124.480.00 dengan jumlah peserta sebanyak 3.191 keluarga. Keluarga dengan tingkat peserta terbanyak berada pada Kecamatan Wasile Selatan sedangkan terendah berapada pada Kecamatan Wasile Utara.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa:

“Adapun langkha-langkah yang kami lakukan dalam memberikan subsidi bagi masyarakat miskin terutama anak-anak yaitu dengan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai untuk keperluan pembelian perlengkapan sekolah, sama halnya dengan Dinas Pendidikan Dinas Kesejahteraan Sosial juga ikut berperan dalam pemberian bantuan bagi anak-anak miskin. (Hasil wawancara KMT, 6 Desember 2016)

Pernyataan diatas di sampaikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur bahwa pemerintah telah memberikan subsidi kepada anak-anak miskin berupa uang tunai untuk membeli keperluan kebutuhan pendidikan. Dengan bantuan ini pemerintah daerah berharap dapat membantu meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat miskin terutama anak-anak.

Selain dengan bantuan sosial berupa pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya bersekolah dan menuntut ilmu sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya ilmu untuk dapat merubah hidup ke arah yang lebih baik. Masyarakat juga merasa senang dan terbantu dengan adanya bantuan uang tunai dari pemerintah daerah untuk anak-anak miskin hal ini dapat mengurangi beban mereka, Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang masyarakat nelayan yang menyatakan bahwa:

“Bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat membantu anak-anak mereka dalam menimba ilmu pengetahuan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga dapat meberikan pemahaman terkait dengan pentingnya bersekolah agar dapat menata hidup ke arah yang lebih baik.” (Hasil wawancara MR, 15 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah satu masyarakat nelayan yang ada di kecamatan wasile selatan yang menyatakan bahwa kami merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial berupa uang tunai bagi anak-anak terutama anak-anak nelayan miskin, dengan bantuan ini pemerintah daerah telah membantu meringankan beban hidup terutama beban untuk menyekolahkan anak-anak mereka, karena kita ketahui bersama bahwa penghasilan para nelayan terutama nelayan miskin di Kabupaten Halmahera Timur itu tidak cukup untuk

menyekolahkan anak-anak mereka, jangankan untuk biaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan mereka sangat sulit untuk terpenuhi. Sehingga dengan adanya bantuan uang tunai ini masyarakat merasa sangat terbantu.

Selain pernyataan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur diatas ada pernyataan lain yakni pernyataan dari Kepala bidang pemberdayaan dan pelayanan sosial yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial telah melakukan berbagai upaya atau kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin terutama anak-anak, seperti memberikan bantuan uang bagi anak yang kurang mampu dengan bantuan tersebut anak bisa memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, pembinaan bagi anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar dengan menyediakan fasilitas sosial berupa panti asuhan, dengan berbagai upaya pemerintah sudah cukup membantu mengurangi tingkat putus sekolah anak-anak yang ada di kabupaten halmahera timur, sebagaimana tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.” (Hasil wawancara RT, 7 Desember 2016)

Pernyataan diatas adalah pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan anak-anak miskin terutama anak-anak nelayan, pemerintah telah melakukan pembinaan bagi anak jalanan, anak terlantar dan anak-anak nakal yang ada di kabupaten halmahera timur dengan menyediakan panti asuhan bagi anak-anak jalanan, meberikan bantuan sosial berupa dana yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Akan tetapi yang menjadi kendala atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin saat ini adalah ketika anak mereka lulus SMA karena tidak

bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yakni kuliah karena tidak memiliki biaya. Ini adalah salah satu masalah yang cukup sulit dihadapi oleh masyarakat miskin terutama masyarakat nelayan sehingga masyarakat berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini, yang menyatakan bahwa:

“Kami merasa terbantu dengan pendidikan gratis yang diterapkan oleh pemerintah daerah saat ini karena cukup membantu mengurangi beban hidup kami, pendidikan dari SD sampai SMA memang sudah gratis, dan anak-anak kami mendapat bantuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial berupa bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan berupa membeli perlengkapan sekolah akan tetapi yang menjadi masalah ketika anak kami lulus SMA hal ini karena kami tidak punya biaya yang bisa melanjutkan sekolah anak-anak kami ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kami berharap bantuan dari pemerintah daerah, ada memang bantuan beasiswa dari pemerintah daerah akan tetapi sebagian kecil saja yang mendapatkannya untuk itu kami mengharapkan kedepan nanti pemerintah bisa lebih mengefektifkan kebijakan terkait dengan bantuan sosial berupa beasiswa tersebut. “(Hasil wawancara SN, 13 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan gratis dan bantuan sosial dari Dinas Kesejahteraan Sosial sudah cukup membantu mengurangi beban hidup mereka, sehingga mereka cukup puas dengan kinerja pemerintah daerah akan tetapi mereka masih berharap agar pemerintah bisa lebih mengefektifkan kebijakan yang terkait dengan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai bagi yang anak-anak miskin. Masyarakat nelayan berharap perhatian pemerintah daerah terhadap anak mereka bisa ditingkatkan agar kesejahteraan anak-anak bisa tercapai melalui berbagai program pemberayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten halmahera timur.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang menyampaikan bahwa:

“Kami dari pemerintah daerah telah melakukan intervensi terhadap penanganan anak-anak miskin pesisir, selain bantuan uang tunai dinas kesejahteraan sosial juga telah bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas pendidikan dan perhubungan untuk menyediakan bus sekolah yang dapat membantu anak-anak miskin bersekolah, karena banyak anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah sehingga pemerintah mencoba menyediakan bus sekolah agar mempermudah anak-anak ke sekolah. (Hasil wawancara, AD 7 Desember 2016)”

Sesuai dengan pernyataan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesejahteraan sosial telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan anak-anak miskin pesisir di kabupaten Halmahera Timur yang merujuk pada bantuan-bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah daerah hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah saat ini telah bekerja sesuai fungsi dan tugasnya meskipun masih harus ditingkatkan agar terealisasinya kesejahteraan bagi anak-anak miskin khususnya anak miskin pesisir di kabupaten halmahera timur. Senada dengan yang disampaikan oleh salah satu Staf Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa:

“Dinas Kesejahteraan Sosial juga ikut berperan menangani anak-anak terutama anak-anak miskin pesisir dengan menjalankan berbagai program pemberdayaan, salah satu ikut aktif menjalankan program keluarga harapan (PKH) dimana dalam program keluarga harapan tersebut terdapat bantuan untuk anak-anak berupa pemberian uang tunai yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk memenuhi kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan menyangkut dengan pembelian perlengkapan sekolah. (Hasil wawancara IAK, 7 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah satu Staf Dinas Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial telah berperan aktif

dalam menangani anak-anak miskin pesisir dengan mencoba berbagai program pemberdayaan dan salah satu program yang telah dijalankan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial yaitu program keluarga harapan (PKH) dimana dalam program ini terdapat bantuan-bantuan untuk anak-anak miskin, bantuan berupa dana yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pendidikan mereka misalnya membeli perlengkapan sekolah. Dengan bantuan tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berharap ke depannya nanti pemerintah lebih mengefektifkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat terutama anak-anak miskin pesisir yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga masyarakat khususnya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak demi kehidupan yang lebih baik dan tentunya bisa tercapainya kesejahteraan bagi anak-anak miskin sesuai dengan tujuan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh satu seorang masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kami dari masyarakat berharap agar pemerintah lebih mengefektifkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin terutama anak-anak nelayan yang ada di Kabupaten Hamahera Timur, karena dengan kebijakan tersebut kami merasa diperhatikan oleh pemerintah dan juga dapat membantu meringankan beban kami sebagai masyarakat nelayan miskin yang dengan penghasilan serba pas-pasan, sehingga anak-anak kami juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. (Hasil wawancara YAK, 13 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang menyatakan bahwa mereka berharap agar pemerintah lebih mengefektifkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak nelayan miskin

sehingga anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak yang sudah lulus SMA atau anak yang berusia 19-24 tahun karena dengan kebijakan-kebijakan tersebut masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah khusus pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Berdasarkan hasil reduksi data yang yang dideskripsikan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahawa pihak Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial serta elemen pemerintah yang terkait di dalamnya telah berupaya melakukan pengentasan kemiskinan yang termasuk didalamnya penanganan anak-anak miskin dengan tujuan anak-anak terbebas dari kemiskinan dan hidup sejahterah sesuai dengan tujuan Negara. Dari data yang di dapat oleh peneliti ternyata pedidikan di Kabupaten Halmahera Timur semakin hari semakin membaik dengan beberapa program pemerintah yang mendukung sehingga dapat mengurangi tingginya angka putus sekolah. Akan tetapi yang menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menurunnya angka partisipasi sekolah di usia 18 tahun keatas yakni masa dimana anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hal ini yang harus di intevensi oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

3. *Regulation* (Pengaturan)

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dengan tujuan agar masyarakat terbebas dari kemiskinan dan hidup sejahteraah terutama kesejahteraan bagi anak-anak nelayan miskin. Pemerintah

Daerah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan berbagai upaya untuk dalam hal kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan terhadap anak-anak terutama anak miskin pesisir yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 Tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” dan Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. Berdasarkan keputusan diatas pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur ikut berpartisipasi menjalankan program keluarga harapan (PKH) yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Serta Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Timur.

Program ini disambut baik oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial karena dengan program ini pemerintah daerah berharap bisa mengatasi masalah kemiskinan terutama kemiskinan terhadap anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Dan pemerintah daerah juga akan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan berbagai upaya kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terutama anak-anak miskin. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, kemudian penanganan anak-anak miskin melalui berbagai

kebijakan diantaranya, pemerintah ikut berpartisipasi dalam program keluarga harapan (PKH) dimana program ini pemerintah memberikan bantuan uang tunai bagi anak-anak miskin dan digunakan untuk melengkapi keperluan sekolah.” (Hasil Wawancara, KMT 6 Desember 2016)

Penyataan diatas disampaikan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dalam hal pengentasan terhadap kemiskinan, kemudian penanganan anak-anak miskin melalui berbagai kebijakan sehingga masyarakat miskin terbebas dari kemiskinan dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depan yang lebih baik, sesuai dengan tujuan Negara yaitu kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Iya, pemerintah daerah telah melakukan upaya penanganan anak-anak miskin terutama anak nelayan miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur melalui kebijakan dan berharap mampu mencegah anak-anak tersebut putus sekolah, pemerintah juga berperan aktif dalam perlindungan sosial bagi anak-anak karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak rentan terhadap kejahatan seperti kejahatan seksual terhadap anak, dan lain-lain. Sehingga ada kegiatan pembinaan anak nakal, anak jalanan dan anak terlantar.” (Hasil wawancara, RT 7 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial yang menyatakan bahwa ada berbagai upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah anak-anak miskin terutama anak-anak nelayan miskin yang ada di Kabupaten Halmahera timur melalui berbagai kebijakan seperti sekolah gratis, Dinas Kesejahteraan Sosial juga memberikan bantuan uang tunai bagi siswa miskin yang terdapat dalam program keluarga harapan (PKH)

kemudian pembinaan dan lain-lain sehingga pemerintah berharap mampu mensejahterakan anak-anak miskin.

Kesejahteraan sosial anak miskin pesisir yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (mamadai) terhadap anak-anak dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan materiil, tetapi juga dalam kehidupan spiritual anak-anak yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah seorang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan pemerintah terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan anak-anak miskin yang ada di kabupaten Halmahera timur melalui program keluarga harapan (PKH) dan cukup membantu meringankan beban masyarakat. terutama nelayan miskin. (Hasil wawancara, MR 15 Desember 2016).

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah seorang nelayan yang ada di kecamatan wasile selatan Kabupaten Halmahera Timur yang menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin. Mereka merasa pemerintah daerah saat ini telah memberikan pelayanan yang baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat nelayan miskin yang menyatakan bahwa:

“Kami merasa terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan anak-anak miskin, dengan program tersebut kami merasa di perhatikan oleh pemerintah daerah dan cukup merasa senang mendapatkan bantuan sosial sehingga bisa membeli perlengkapan sekolah anak-anak kami.” (Hasil wawancara, SN 13 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah seorang nelayan miskin yang menyatakan bahwa masyarakat terutama masyarakat nelayan miskin cukup

merasa senang dengan kinerja pemerintah yang menurut mereka cukup baik karena pemerintah telah membantu meringankan beban hidup mereka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengentasan kemiskinan dan mereka merasa telah di perhatikan oleh pemerintah daerah.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan seperti program keluarga harapan (PKH) itu sangat membantu masyarakat terutama anak-anak mereka, akan tetapi masyarakat masih berharap agar pemerintah daerah terus berusaha membuat program atau kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin yang berusia 18 tahun ke atas agar mereka juga bisa mengenyam atau mendapatkan pendidikan yang layak. (Hasil wawancara YAK, 13 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang menyatakan bahwa mereka sangat berharap kepada pemerintah daerah agar membuat program atau kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin yang usia 18 tahun keatas agar anak-anak tersebut juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depan yang lebih baik dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang menyatakan bahwa:

“Kami akan terus berusaha membuat program atau kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin yang berusia 18 tahun keatas agar anak-anak tersebut juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak, karena kami menyadari betul bahwa anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan diberdayakan dengan pendidikan yang layak maka anak tersebut akan bisa menata hidup ke depan yang lebih baik. (Hasil wawancara AD, 7 Desember 2016)

Pernyataan diatas disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial akan terus berusaha membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin yang berusia 18 tahun ke atas karena mereka menyadari bahwa anak adalah generasi yang harus dilindungi dan diberdayakan. Akan tetapi menurut mereka bahwa pemberdayaan terhadap anak tidak akan tercapai apabila hanya satu elemen saja yang terlibat, maka dari itu agar kesejahteraan anak-anak miskin terselenggara mereka mengharapkan agar elemen-elemen yang lain juga ikut terlibat di dalamnya.

Jawaban dari beberapa informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah saat ini cukup baik dan pemerintah daerah telah berupaya membuat kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur sehingga cukup mampu meringankan beban dari masyarakat miskin terumana anak-anak miskin pesisir.

Organisasi pengelolaan harus dilakukan dengan baik agar kegiatan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu dalam fungsi manajemen setelah kegiatan berlangsung adalah pengawasan, sebab dengan adanya pengawasan kita dapat melihat kegiatan yang sedang berjalan agar sesuai yang di harapkan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu organisasi dalam hal ini penintervensi terhadap penanganan anak-anak miskin pesisir.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan

sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berikut hasil kutipan wawancara beberapa informan terkait dengan pengawasan berikut ini:

“Dalam pengawasan kegiatan kebijakan penanganan kesejahteraan sosial anak-anak miskin pesisir yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik dalam pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam suatu kegiatan, bentuk pengawasan yang dilakukan dapat berupa laporan hasil evaluasi program kebijakan terkait dengan penanganan anak-anak miskin di Kabupaten Halmahera Timur, selain Dinas Kesejahteraan Sosial Timur ada juga pihak-pihak lain yang ikut serta dalam mendukung program penanganan anak-anak miskin pesisir yaitu dari pihak instansi pemerintahan lainnya yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur. (Hasil Wawancara, KMT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, 6 Desember 2016)

Pernyataan diatas bahwa pengawasan dalam program kebijakan penanganan kesejahteraan sosial anak-anak miskin pesisir semua pihak terkait di dalamnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melibatkan semua kalangan dalam pengawasan kebijakan penanganan anak-anak miskin tersebut. Saya rasa semua pihak akan bertanggung jawab di dalamnya dan saling mendukung dengan pencapaian hasil kebijakan, seperti dalam suatu konsep pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dengan adanya suatu pengawasan dalam kegiatan penanganan kesejahteraan sosial anak-anak miskin pesisir yang dilakukan oleh pemerintah segala bentuk program kegiatan yang

telah direncanakan akan mendapatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara bersama. Seperti dengan pernyataan pendukung hasil wawancara informan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial berikut ini:

“Masalah pengawasan seputar dengan kegiatan pelaksanaan penangananan kesejahteraan sosial bagi anak-anak miskin yang kami lakukan, mendorong kerja sama berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang menjadi acuan di dalam pengawasan program penanggulangan kemiskinan tersebut, kami juga menibatkan tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri sehingga setiap kegiatan yang kami lakukan mendapat dukungan dari pihak tertentu” (Hasil Wawancara, RT 7 Desember 2016)

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Pembardayaan dan Pelayanan Sosial tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam masalah pengawasan terkait dengan adanya suatu kegiatan penanggulangan kemiskinan yang termasuk di dalamnya penanganan anak-anak miskin pesisir yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan tidak lepas masyarakat itu sendiri sehingga kegiatan yang mereka lakukan mendapat dukungan dari semua kalangan yang terkait, tapi muncul beberapa pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat itu sendiri jika memang iya dilibatkan seperti pernyataan tokoh masyarakat bentuk pengawasan yang dilakukannya sebagai berikut:

“Sejauh ini, selama kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa penanganan anak-anak miskin kami tidak terjun langsung dalam hal pengawasan seputar kegiatan itu tetapi ada beberapa orang yang dilibatkan di dalamnya biasanya dalam membentuk kepanitiaan sosialisasi terkait pentingnya bersekolah bagi masyarakat. (Hasil Wawancara, AK sebagai tokoh masyarakat, 16 Desember 2016)

Dari pernyataan diatas bahwa selaku tokoh masyarakat tidak terjun langsung dalam melakukan suatu kegiatan pengawasan penanggulangan kemiskinan berupa penanganan kesejahteraan sosial anak-anak miskin tetapi dibentuk dalam kepanetiaan pelaksanaan tentunya dalam hal ini, yang terkait adalah pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung yang dilakukan oleh pihak tokoh masyarakat. Dalam hal ini kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan secara khususnya di bentuk susunan kepanitiaan agar dapat terstruktur dengan baik dan tidak rancuh dalam pelaksanaan suatu kegiatan terhadap proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dengan berhasilnya suatu pencapaian diinginkan maka dapat diukur keberhasilan kegiatan penanggulangan kemiskinan dal hal ini penanganan anak-anak miskin oleh pemerintah tersebut. Tanggapan diatas didukung dengan pernyataan masyarakat.

“Masalah pengawasan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan pengentasan kemiskinan yang didalamnya penanganan anak-anak miskin kami hanya ikut sertakan dalam merasakan kegitan tersebut hanya ada beberapa masyarakat yang diikut sertakan di dalam pengawasan tersebut artinya, tidak semua masyarakat terlibat didalamnya. (Hasil Wawancara, HS 17 Desember 2016)

Berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan dengan pengawasan suatu kegiatan pengentasan kemiskinan tidak dilibatkan di dalamnya hanya ikut sertakan di dalam merasakan kegiatan tersebut. Hanya ada beberapa masyarakat saja yang ikut sertakan di dalam pengawasan tersebut ini mendukung dari pernyataan tokoh masyarakat diatas bahwa ada

beberapa masyarakat saja yang terlibat di dalamnya untuk mewakili masyarakat setempat yang secara jelas memberikan dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara khusus pada masyarakat sekitar walaupun semua masyarakat tidak ikut dalam melakukan pengawasan yang secara langsung.

Berdasarkan hasil reduksi data yang dideskripsikan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan semua pihak yang terkait didalamnya mulai dari instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri tetapi dalam hal ini tidak semua masyarakat dan tokoh masyarakat terjun langsung dalam pengawasan tersebut ada perwakilan dari masyarakat itu sendiri tetapi secara tidak langsung masyarakat ikut serta dalam pengawasan suatu kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tidak ada perbedaan jawaban dari semua informan tentang pengawasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa: Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penanganan anak-anak miskin pesisir: (a) berdasarkan pengamatan penulis bahwa *provision* (penyediaan) telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan menyediakan anggaran sebesar 4 milyar dari APBD yang menunjang terlaksananya program pengentasan kemiskinan yang di dalamnya terdapat penanganan terhadap anak-anak miskin. (b) pemerintah daerah telah memberikan *subsidy* (subsidi/tunjangan) kepada masyarakat miskin terutama anak miskin yaitu pemberian subsidi berbentuk uang tunai dalam program keluarga harapan (PKH) dan bantua-bantuan sosial lainnya. (c) *regulation* (regulasi/peraturan) indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu melaksanakan suatu program kerja berdasarkan yang telah ditetapkan. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Timur.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah harus tidak henti-hentinya melakukan pemberdayaan bagi masyarakat miskin terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberdayakan dan dilindungi karena memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
2. Kepada masyarakat nelayan terutama masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur agar dapat berpartisipasi dengan baik terutama untuk kesejahteraan anak-anak miskin.
3. Perlu peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pihak swasta untuk kesejahteraan anak-anak terutama anak-anak nelayan miskin.
4. Diperlukan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah dalam hal penanganan anak-anak miskin pesisir yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damayanti, Whanty. 2006. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. LKiS Pelangi Aksara: Yogyakarta.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, J.L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelautan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rahman, 2014. *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan Mangrove*, Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*: PT Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2011, *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto. 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum nelayan*. Laksbang Mediatama: Malang.
- Setiyono budi. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*, Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing service).
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Suyanto, Bagong.2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: Intrans Publishing.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jilid 1, Edisi Kedelapan)*. Jakarta: Erlangga.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas.

INTERNET

BPS. 2014. *Kabupaten Halmahera Timur dalam Angka*.
www.Haltimkab.bps.go.id

IPM. 2013. *Kabupaten Halmahera Timur Dalam Angka*.
www.Haltimkab.bps.go.id

Said, Abdullah. 2008. *Campur Tangan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Dasar Beras*. Di akses pada tanggal, 22, Maret:

<https://acriski.wordpress.com/2013/04/26/pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat-miskin/>. Di akses pada tanggal, 23, Januari:

RIWAYAT HIDUP



SITI JUNIARTI A. KADIR. Lahir di Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 08 Juli 1993, sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Almarhum Abdullah Abd Kadir dan Ibu Astuti H. Abdurahman. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 1999 di SD Inpres Lolobata di Kecamatan Wasile Tengah dan tamat pada tahun 2005, Tahun 2008 tamat SMP di sekolah SMP Negeri 1 Halmahera Timur dan pada tahun 2011 tamat SMA di sekolah SMA Negeri 4 Kota Ternate. Selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan insyaallah selesai pada tahun 2018.